

## RINGKASAN

### A. Judul: HUBUNGAN NEGARA-MASYARAKAT DAN KAPITALISME DALAM TRANSPORTASI PUBLIK

(Siti Aminah, Sri E. Kinasih, Tahun 2006, 71 halaman)

#### B. 1. Permasalahan Penelitian

1. Sampai sejauh mana peran pemerintah dalam mengatur bidang transportasi publik? (2) Bagaimana hubungan antara negara, masyarakat, dan kapitalisme dalam sistem transportasi publik berkelanjutan?

#### B. 2. Tujuan Penelitian

- 1) Melihat secara empiris relasi negara, masyarakat, kapitalisme (swasta) dalam bidang transportasi publik. (2) Menjelaskan peran pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan transportasi Publik (3) Melihat secara empiris sampai sejauh mana aksesibilitas masyarakat terhadap pola transportasi publik di kota Surabaya tersebut. (4)

#### B. 3. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan yang dipakai

Penelitian ini dirancang dengan menetapkan kegiatan yang meliputi: wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk mengumpulkan informasi yang menyangkut peranan negara, masyarakat, kapitalis yang dijalankan selama ini di bidang transportasi kota. Wawancara terhadap penentu kebijakan transportasi (Dinas Perhubungan, DPRD Kota Surabaya, Organda, dan implementator program, pengusaha angkutan public, dan pengguna jasa angkutan transportasi public), dan review serta analisis dokumen tentang kebijakan transportasi kota. Lokasi Penelitian: Daerah penelitian ditetapkan di kota Surabaya..

Teknik Pengumpulan Data: (i) Wawancara mendalam (*depth-interview*) digunakan untuk mengumpulkan informasi yang menyangkut peranan negara, masyarakat, kapitalis yang dijalankan selama ini di bidang

transportasi kota; (ii) Review dan analisis dokumen tentang transportasi kota. Sumber data primer dan sekunder adalah: Bapeko, Dinas Tata Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Jasa Marga), masyarakat (pengguna angkutan publik).

Metode analisis menggunakan teknik interpretasi. Artinya, seluruh data yang telah diperoleh dari wawancara maupun data sekunder analisis mulai saat penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil tersebut diharapkan mencerminkan keadaan riil yang akan dirangkum menjadi kesimpulan. Interpretasi dan analisis data dilakukan, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

#### B.4. Hasil dan Kesimpulan

Hubungan negara, masyarakat dan kapital dalam transportasi publik di kota Surabaya sudah menunjukkan hubungan sinergis, meski masih belum optimal. Karena ada orientasi ganda dari pemerintah dalam membuat kebijakan transportasi. Peranan pemerintah sebagai regulator penting guna menjamin pengembangan akses warga negara terhadap pelayanan publik didorong melalui kebijakan pengembangan transportasi yang memihak pada orang miskin. Mengingat perpolitikan dibalik pengembangan sistem transportasi tersembunyi di balik berbagai teknikalitas dan dengan mudahnya terabaikan oleh hegemoni teknokrat, maka pendidikan politik bagi para teknokrat merupakan permulaan yang harus ditempuh.

Kerjasama masyarakat, khususnya dalam menanggung beban kenaikan pajak sangat diperlukan untuk pelaksanaan rencana induk. Masyarakat harus mendapat penjelasan menyeluruh mengenai rencana tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kesempatan seperti rapat dengar pendapat umum dan rapat stakeholder dimana pendapat masyarakat dapat didengar dan ditampung dalam rencana tersebut. Tambahan lagi, efek pelaksanaan proyek perlu pula dipantau dengan baik. Dalam hal ini, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah merupakan hal yang utama. Keterbukaan sangat penting artinya guna memperoleh penerimaan dan kerjasama masyarakat. Kebijakan di bidang transportasi publik tidak bisa diartikan sebagai penggunaan otoritas negara oleh para pejabat publik dalam menentukan pilihan

langkah-langkahnya, melainkan juga harus dimaknai sebagai penggunaan rasionalitas publik yang konsisten dengan rasionalitas kepentingan warganya. Artinya adalah kebijakan publik harus mengacu pada kepentingan nyata masyarakat dan tidak pada kepentingan pengusaha atau elite politik tertentu. Karena masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan transportasi.

Dengan demikian terlihat bahwa tiga pelaku dalam sistem transportasi publik yaitu *costumer* atau masyarakat, operator atau pengusaha dan pemerintah bekerjasama memecahkan masalah yang ada pada sistem transportasi publik kota. Pemerintah posisinya sebagai regulator berperan mengatur kepentingan masyarakat dan pengusaha. Tetapi ada perbedaan dimana berbeda pengusaha prinsipnya untuk cari untung dengan biaya murah dan atau mendapat untung sebanyak –banyaknya, sedangkan prinsip masyarakat adalah bagaimana dengan uang yang serendah mungkin mendapat fasilitas yang nyaman. Karena itu fungsi pemerintah adalah menjaga itu kepentingan itu berada dalam keseimbangan sebagai regulator.

#### Kesimpulan:

Peranan pemerintah kota Surabaya dalam transportasi public sebagai regulator dan penyeimbang kepentingan masyarakat dan capital (swasta/operator/pengusaha angkutan). Sebagai regulator, pemerintah tidak dapat dengan mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kekuatan capital, karena kedua belah pihak memiliki orientasi kepentingan yang berbeda satu sama lain. Orientasi kepentingan masyarakat pada pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam konsepsi system transportasi berkelanjutan. Sementara itu kekuatan capital lebih mementingkan pencapaian keuntungan yang optimal. Kekuatan capital memiliki juga berkepentingan untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Dibiayai oleh : DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor S.K. Rektor : Nomor: 4017/JO3/PP/2006

Tanggal : 2 Juni 2006